

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa persepsi kepala instansi pendidikan di Kecamatan Cigemblong terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan terbentuk melalui proses yang sistematis dan berurutan, dimulai dari aspek kognitif, dilanjutkan dengan aspek afektif, dan bermuara pada aspek konatif. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pola persepsi yang relatif seragam di antara para kepala instansi pendidikan, sehingga praktik pemerasan tidak lagi dipahami sebagai peristiwa insidental, melainkan sebagai fenomena struktural yang berulang dan berpotensi mengancam integritas institusi pendidikan.

Pada aspek kognitif, kepala instansi pendidikan memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai praktik pemerasan oleh oknum wartawan. Pemahaman tersebut mencakup definisi pemerasan, bentuk dan modus operandi yang digunakan, serta pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 6. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ini tidak hanya dibentuk oleh pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pertukaran informasi antarkepala instansi di tingkat kecamatan. Proses komunikasi informal tersebut membentuk persepsi kolektif yang memperkuat kesadaran bersama mengenai pola ancaman dan risiko yang ditimbulkan oleh praktik pemerasan, sehingga aspek kognitif bersifat komunal dan institusional.

Pemahaman kognitif tersebut kemudian memengaruhi aspek afektif, yaitu respons emosional kepala instansi pendidikan terhadap praktik pemerasan. Para informan menunjukkan reaksi emosional berupa kecemasan, kewaspadaan, ketidaknyamanan, dan kekecewaan, terutama karena ancaman pemberitaan negatif dipersepsikan dapat merusak reputasi sekolah dan kredibilitas pribadi sebagai pimpinan lembaga. Respons afektif ini tidak semata-mata bersifat personal, tetapi juga bersumber dari tanggung jawab struktural sebagai kepala instansi yang harus menjaga nama baik lembaga pendidikan. Meskipun demikian, para informan masih mampu membedakan antara wartawan profesional dan oknum yang menyimpang, sehingga sikap emosional yang muncul tidak berkembang menjadi penolakan total terhadap profesi wartawan.

Selanjutnya, integrasi antara pemahaman kognitif dan respons afektif tersebut membentuk aspek konatif, yaitu kecenderungan tindakan kepala instansi pendidikan dalam menghadapi praktik pemerasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan cenderung mengambil langkah defensif dan pasif, seperti menghindari interaksi lanjutan, bersikap sangat selektif terhadap pihak media, atau menyelesaikan persoalan secara informal tanpa menempuh jalur pelaporan resmi. Rendahnya kecenderungan untuk melaporkan praktik pemerasan bukan disebabkan oleh ketidakpedulian, melainkan oleh keterbatasan pengetahuan hukum, kekhawatiran terhadap dampak reputasi institusi, serta ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Pola konatif ini bersifat sistematis dan berulang, sehingga

berpotensi memperpanjang keberlangsungan praktik pemerasan di lingkungan institusi pendidikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah diperoleh dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan berbagai aspek yang dapat ditingkatkan. Penulis juga memahami bahwa terdapat ruang pengembangan yang cukup luas agar penelitian di masa mendatang mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam menyempurnakan dan memperluas kajian serupa.

Pertama, merujuk pada temuan aspek kognitif, diperlukan peningkatan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai hak dan kewajiban kepala instansi pendidikan dalam berhadapan dengan wartawan. Sosialisasi mengenai Kode Etik Jurnalistik, mekanisme kerja pers yang profesional, serta perbedaan antara wartawan resmi dan oknum perlu dilakukan secara formal dan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada informasi informal antarkepala instansi, sehingga pemahaman yang terbentuk tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga berbasis regulasi dan prosedur yang jelas.

Kedua, berkaitan dengan temuan aspek afektif, diperlukan ruang komunikasi yang aman dan institusional bagi kepala instansi pendidikan

untuk berbagi pengalaman dan tekanan emosional yang dialami akibat praktik pemerasan. Forum koordinasi antarkepala instansi yang selama ini bersifat informal dapat diformalkan sebagai wadah diskusi dan dukungan psikologis kolektif. Dengan demikian, respons emosional seperti kecemasan dan ketakutan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi juga ditangani secara struktural melalui solidaritas dan dukungan kelembagaan.

Ketiga, berdasarkan temuan aspek konatif, perlu disusun mekanisme penanganan dan pelaporan praktik pemerasan yang jelas, sederhana, dan terkoordinasi di tingkat kecamatan atau kabupaten. Ketiadaan prosedur yang pasti terbukti memengaruhi kecenderungan kepala instansi untuk memilih sikap pasif dan menghindar. Oleh karena itu, pembentukan prosedur standar operasional (SOP) dalam menghadapi wartawan, termasuk alur pelaporan ke pihak berwenang atau Dewan Pers, menjadi langkah strategis untuk mengubah kecenderungan tindakan defensif menjadi respons yang lebih tegas dan terukur.

Secara keseluruhan, saran-saran tersebut diharapkan mampu menjawab temuan penelitian secara langsung, serta mendorong perubahan pada level pemahaman, pengelolaan emosi, dan kecenderungan tindakan kepala instansi pendidikan dalam menghadapi praktik pemerasan oleh oknum wartawan di Kecamatan Cigemblong.